

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam mengelola pendidikan. Satu upaya meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut melalui Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa Komite Madrasah adalah partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal.¹

Pada tataran implementasi, desentralisasi pendidikan harus memberi kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pendayagunaan dan pengelolaan pendidikan mereka. Tuntutan partisipasi akan memberi konsekuensi terhadap semakin tingginya tingkat variasi secara kuantitatif maupun kualitatif dalam penyelenggaraan pendidikan. Disamping itu desentralisasi pendidikan mengandung arti adanya pelimpahan kewenangan pemerintah kepada masyarakat. Sebagai implikasinya dalam pengelolaan pendidikan di madrasah dituntut adanya pelimpahan wewenang kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholders*) untuk ikut bertanggungjawab dalam memajukan madrasah.

Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan satu wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan dalam mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Madrasah.

Komite madrasah merupakan badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan madrasah. Pada dasarnya posisi komite madrasah berada di tengah-tengah antara orang tua murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak sekolah sebagai institusi, kepala sekolah. Dinas

¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Komite Madrasah*, Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2003, hlm. 9

pendidikan wilayahnya, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Peran komite madrasah diharapkan dapat menjembatani keduanya. Pemerintah melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan diharuskan membentuk Komite Sekolah di setiap satuan pendidikan. Komite Sekolah diharapkan dapat meningkatkan kontrol terhadap kinerja satuan pendidikan dalam menjalankan setiap kebijakan pendidikannya.²

Dibentuknya Komite Sekolah dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah atau sering disebut Komite Madrasah pada madrasah swasta yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat.³

Dalam Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 bab XV tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan pasal 56 menyebutkan “(1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, (2) Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak memiliki hubungan hirarkis, (3) Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”⁴

Komite Madrasah dibentuk dengan maksud untuk dapat mewartakan, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggungjawab serta peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam

² Khaeruddin, dkk, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Konsep dan Implementasinya di Madrasah*, Pilar Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 247-248

³ *Ibid.*, hlm. 248-249

⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Guru dan Dosen*, Fokusmedia, Bandung, 2006, hlm 64

penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Salah satu upaya penting sebagai tindak lanjut peningkatan kontribusi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah adalah pembentukan Komite pada tiap-tiap satuan pendidikan. Dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Karena pembentukan Komite Madrasah dapat mendorong akuntabilitas public (*public accoutability*) terhadap pendidikan di madrasah menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena madrasah harus secara moral memiliki tanggungjawab secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi pendidikan sebagai salah satu bagian dari otonomi daerah, maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, diperlukan suatu wadah yang dapat mengakomodasikan pandangan-pandangan, aspirasi dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin terciptanya demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas pendidikan. Oleh karena itu pendidikan dengan segala persoalannya tidak mungkin disatasi oleh satu lembaga sekolah. Untuk melaksanakan program-programnya, sekolah perlu mengundang dari berbagai pihak yaitu keluarga, masyarakat dan dunia industri/usaha untuk berpartisipasi seccara aktif dalam berbagai program pendidikan.⁵

MTs Pesantren Baru Roudlotul Muftadiin Balekambang Jepara sebagai lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Departemen Agama telah mengikuti alur yang ditetapkan oleh pemerintah. MTs Pesantren Baru Roudlotul Muftadiin Balekambang Jepara telah membentuk dan memiliki Komite Madrasah yang diharapkan dapat menunjang pengembangan madrasah menuju lebih baik.⁶

Komite madrasah juga merupakan institusi yang dimunculkan untuk menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ditingkat satuan pendidikan. Karena dijadikan wadah yang representatif, kemunculan komite madrasah diharapkan bisa mewujudkan peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi dalam pengelolaan disatuan pendidikan. Baik pada

⁵ <http://re-searchengines.com/1005sukron.Html>

⁶Hasil wawancara dengan bapak. Ali Sibro Malisi, Ketua Komite MTs Pondok Baru Roudlotul Muftadiin Balekambang Jepara, pada tanggal 14 Mei 2017

pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.⁷

Pendidikan pada era sekarang banyak menghadapi tantangan dan persoalan, di antaranya semakin menurunnya mutu pendidikan yang belum mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyaknya persoalan dalam dunia pendidikan, maka dipandang perlu adanya inovasi di dalam pendidikan tersebut, salah satunya dengan mengadakan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸

Di sisi lain, dalam rangka pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pengadaan perlengkapan sekolah harus dilakukan sendiri oleh sekolah, baik dengan menggunakan dana bantuan dari pemerintah maupun dana sekolah sendiri. Artinya, dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan semua bentuk penyerahan perlengkapan pemerintah ke sekolah harus diubah dari bentuk pemberian dana ke dalam bentuk *black ground* kepala sekolah, kemudian kepala sekolah bersama guru dan bila perlu pengurus komite sekolah merencanakan dan melakukan pengadaan sendiri perlengkapan yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.⁹

Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di madrasah perlu di dukung kemampuan manajerial kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. Karena itu hubungan baik antar guru perlu diciptakan agar terjalin iklim dan suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan fisik dan manajemen sekolah perlu dibina agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan kreatifitas, disiplin dan semangat belajar peserta didik.¹⁰

⁷Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2013, hlm. 89

⁸Sulistiyorini dan Muhammad Fathurrohman, *Esensi Manajemen Pendidikan Islam*, Teras, Yogyakarta, 2014, hlm. 193

⁹Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 21

¹⁰E.Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 46.

Mutu pendidikan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak stagnan, tetapi bersifat dinamis. Suatu ketika sebuah lembaga dalam kondisi yang maju dan berkualitas. Banyak peminat yang tidak tertampung dalam lembaga tersebut. Selain itu kualitas siswanya juga cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan prestasi yang umumnya lebih unggul dibandingkan dengan sekolah yang lainnya. Namun jika kondisi manajemen yang dikelola tidak mampu bertahan dalam kondisi yang baik, maka dalam perkembangannya juga akan ditinggalkan oleh para peminatnya. Hal sebaliknya juga bisa terjadi dimana sebuah lembaga pada awalnya dalam kondisinya kurang bagus, namun karena mereka terus berbenah pada akhirnya kemajuan yang dapat dicapai. Jumlah siswa meningkat, dan kualitas semakin di depan. Lembaga yang pada awalnya berada dalam posisi sejajar dengan berbagai lembaga pendidikan yang telah maju.

Sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi belajar dan pembelajaran. Ada perbedaan antara sarana dengan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan pada umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti gedung/ruang kelas, alat-alat/media pembelajaran, meja, kursi, laboratorium komputer dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan ialah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun/taman sekolah, jalan menuju sekolah, dan lain-lain.

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik, seperti gedung, mebel, dan peralatan sekolah lainnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang usia pakai, menurunkan biaya perbaikan dan menetapkan biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Dalam manajemen ini perlu dibuat program preventif di sekolah dengan cara pembentukan tim pelaksana, membuat daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal kegiatan perawatan pada masing-masing bagian dan memberikan penghargaan bagi mereka

yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran merawat sarana dan prasarana sekolah.¹¹

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan memiliki tugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Dengan manajemen sarana dan prasarana yang baik, harapannya ialah agar tercapai sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru maupun murid-murid sebagai pelajar.

Proses kegiatan belajar mengajar (KBM) MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara berlangsung tanpa menggunakan media elektronik seperti LCD proyektor. Sehingga anak-anak menjadi bosan. Guru cenderung menggunakan buku sebagai bahan ajar. Guru hendaknya dapat menggunakan peralatan yang lebih ekonomis, efisien dan tidak menolak menggunakan teknologi. Agar seorang guru dalam menggunakan media bisa efektif, guru tersebut harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan. Oleh karena itu guru harus mempunyai keterampilan dalam memilih dan menggunakan media pendidikan /pengajaran.¹² Tidak hanya itu, sebuah madrasah hendaknya menyediakan sarana yang memadai agar proses belajar mengajar berlangsung dengan efektif. Karena media dan teknologi merupakan sarana yang sangat membantu guru dalam menyampaikan materi. Dampaknya siswa menjadi lebih mudah dalam menerima materi yang disampaikan dan tentunya pembelajaran lebih menyenangkan bagi siswa.

Sekolah memberikan fasilitas berupa sarana prasarana serta buku penunjang belajar pada siswa dan tugas seorang guru yaitu menciptakan keadaan belajar yang kondusif saat proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang baik dan minat belajar yang tinggi diharapkan meningkatkan prestasi belajar siswa.

¹¹M.Sobry Sutikno, *Manajemen Pendidikan, Langkah Praktis Mewujudkan Lembaga Pendidikan yang Unggul*, Holistica, Lombok, 2012, hlm. 88.

¹²Asnawir & Basyiruddin Usman, *Media Pembelajaran*, Ciputat Pers, Jakarta, 2002, hlm. 19

Fasilitas belajar dalam sekolah meliputi tempat belajar, peralatan tulis, media belajar, LCD proyektor dan fasilitas lainnya. Fasilitas belajar mempermudah siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang timbul sewaktu mempelajari dan memahami pelajaran atau tugas yang diberikan oleh guru. Misalnya seorang siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sedangkan siswa tersebut kurang atau tidak memiliki fasilitas belajar yang menunjang untuk mengerjakan tugas tersebut yang kemungkinan dapat menghambat terselesainya tugas. Sebaliknya jika siswa mempunyai fasilitas belajar yang lengkap, maka tugas dari guru dapat dikerjakan dengan baik. Jadi apabila siswa mendapat fasilitas belajar yang baik dan didukung oleh kemampuan siswa dalam memanfaatkannya secara optimal diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

MTs Pesantren Baru Roudlotul Muhtadiin Balekambang Nalumsari Jepara berlokasi di dusun Balekambang Desa Gemiring Lor Kecamatan Nalumsari. MTs PB Roudlotul Muhtadiin Balekambang Nalumsari Jepara telah mempunyai gedung dan ruang yang representatif dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga lebih mudah dan nyaman untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehari-hari.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki beberapa program seperti; penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pendidikan serta menjalin kerjasama dengan beberapa negara. Semua upaya ini adalah bagian dari sebuah upaya peningkatan mutu pendidikan di negeri ini. Yakni bagi pencapaian sumber daya manusia yang berkualitas dan handal serta beriman dan bertakwa.

Dalam hal ini, komite madrasah beserta kepala MTs Pesantren Baru Roudlotul Muhtadiin Balekambang Nalumsari Jepara melalui pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia dengan mengikuti program *Australia Indonesia Partnership*. Pemerintah Australia menyediakan anggaran bagi pondok pesantren yang memiliki tanah seluas 2 ha dan dibangun sebuah madrasah lengkap dengan desain madrasahnyanya beserta isinya.¹³

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Komite Madrasah Dalam Mengembangkan**

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Zamal, Wakabid Sarana dan Prasarana MTs Pondok Baru Roudlotul Muhtadiin Balekambang Jepara, pada tanggal 14 Mei 2017

Sarana dan Prasarana (Studi Kasus di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara).

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seorang terhadap adanya suatu masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus.

Maka untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti perlu membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penelitian difokuskan pada permasalahan peran komite madrasah dalam mengembangkan sarana dan prasarana di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Nalumsari Jepara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi komite dan pengurus yayasan MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara?
2. Bagaimana pembagian peran di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara?
3. Bagaimana efektifitas dan efisiensi peran komite madrasah dalam mengembangkan sarana dan prasarana di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis eksistensi komite dan pengurus yayasan MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara.
2. Untuk mengetahui pembagian peran di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara.
3. Untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi peran komite madrasah dalam pengembangan sarana dan prasarana di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Agar semua *stakeholder* mengetahui peran komite madrasah dalam pengembangan manajemen sarana dan prasarana.
 - b. Hasil penelitian ini bisa dijadikan informasi ilmiah bagi semua *stakeholder* dalam memperbaiki kualitas pendidikannya.
2. Manfaat Praktis
- a. Secara praktis penelitian ini menambah khazanah keilmuan tentang peran komite madrasah dalam pengembangan sarana dan prasarana.
 - b. Menjadi informasi ilmiah bagi pendidik dan lembaga pendidikan yang membutuhkannya.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Untuk mempermudah pemahaman serta agar tidak terjadi penyimpangan dari permasalahan, maka dibuat sistematika kerangka tesis sebagai berikut :

Bagian Muka. Pada bagian ini terdiri dari: halaman muka, halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar dan daftar isi.

Bagian Isi, bagian isi ini terdiri dari lima bab, yaitu bab I: pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan: Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II : landasan teori. Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan teori-teori yang terdapat di dalam berbagai literatur. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Pertama, peran dan fungsi komite madrasah. Sub bab ke dua, penelitian terdahulu. Sub bab ke tiga kerangka berpikir dan kerangka teoritik.

Bab III : metode penelitian terdiri dari Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi, pengujian keabsahan data, tehnik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, analisis tentang peran komite madrasah dalam mengembangkan saranan dan prasarana di MTs Pesantren Baru Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara.

Bab V : penutup, dalam bab ini mencakup tentang kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir, bagian akhir dalam tesis ini meliputi daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan peneliti dan lampiran-lampiran.

